BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum *International Fund For Agricultural Development* (IFAD)

3.1.1 Sejarah Terbentuknya IFAD

International Fund For Agricultural Developmet (IFAD) merupakan organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada bulan Desember 1977, berkantor pusat di Roma, Italia. Pembentukan IFAD merupakan tindak lanjut atas salah satu hasil utama dari Konfrensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) yang diselenggarakan pada tahun 1974. Konfrensi tersebut diselenggarakan sebagai respon terhadap krisis pangan pada awal 1970-an terutama yang melanda negara-negara di Afrika. Konfrensi memutuskan bahwa "Dana International untuk pembangunan peretanian, utamanya untuk produksi pangan di negara-negara berkembang".

Salah satu hal penting dari konfrensi tersebut adalah penyebab kegagalan produksi pangan, tetapi permasalahan struktural yang terkait dengan kemiskinan dan fakta bahwa sebagaian besar populasi penduduk miskin di negara-negara berkembang terkonsentrasi di daerah pedesaan. Dalam konteks ini, IFAD dibentuk untuk memobilisasi sumber dana dalam bentuk konsesi untuk program-program yang dapat menghapuskan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan gizi.

Tidak seperti lembaga keuangan internasional lainnya, yang memiliki berbagai tujuan, IFAD memiliki mandat yang sangat spesifik, yaitu untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan pedesaan di negara-negara berkembang. (http://www.ifad.org.htm, [diakses 6 Februari 2009]).

Dalam kerangka strategic Framework for IFAD 2002-2006, IFAD akan melanjutkan kinerjanya dalam *enabling the rural poor to evercome their poverty*, melalui pengembangan pembangunan sosial, kesamaan gender, peningkatan pendapatan, peningkatan status gizi, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan *good governance*. (http://www.ifad.org.htm, [diakses 6 Februari 2009]).

3.1.2 Program-Program IFAD Di Indonesia

Indonesia bergabung dengan IFAD pada tanggal 27 september 1978. Dalam setiap program-program yang dirancang oleh IFAD di Indonesia, IFAD selalu di bantu oleh Departement Pertanaian dan Dinas Pertanian di tingkat kota/kabupaten. Sejak tahun 1978 hingga tahun 2004, Indonesia telah menerima bantuan program IFAD sebanyak 13 proyek. Dari total tersebut dua proyek yang saat ini masih berjalan sedangkan sisanya sudah selesai. Dua proyek yang berjalan yang pertama ialah *Participatory Integrated Development In Rainfed Areas* (PIDRA), tujuannya ialah:

a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin yang bermukim di lahan kering,

b) Meningkatkan kegiatan konservasi dan pelestarian sumberdaya alam serta lingkungan.

c) Terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan dalam usaha tani kelompok dan meningkatkan partisipasi wanita dalam kegiatan pembangunan.

d) Mewujudkan ketahanana pangan di pedesaan.

Proyek PIDRA dibiayai dari loan IFAD dengan dana sebesar U$$ 23.570.225 untuk delapan tahun. Dalam pelaksanaanya dibagi dalam phase I (2001-2005) dan phase II (2005-2009). Sasaran kegiatan, terbentuknya 5000 Kelompok Mandiri (KM) pada 500 desa ditiga provinsi yaitu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tengara Timur (NTT). Sedangkan yang kedua ialah program *Rural Empowerment And Agricultural Development* (READ), yang sasaran program ini ialah meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di lima kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yaitu kabupaten, Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso, dan Toli-toli. Program ini berlangsung selama enam tahun dari tahun 2006-2011. (Profile keanggotaan Indonesia pada lembaga/organisasi internasional, Departement Pertanian, 2005: 67-73)]

3.1.3 Tujuan Organisasi IFAD

Tujuan IFAD adalah untuk membantu pembangunan pertanian dan mengatasi masalah pangan di negara-negara berkembang. Sasaran utamanya

adalah petani-petani yang tergolong di bawah garis kemiskinan agar dapat meningkatkan pendapatannya.

3.1.4 Sumber Dana IFAD

Tingkat komitmen tahunan IFAD sekitar US$450 juta untuk membiayai pinjaman dan hibah IFAD, yang bersumber utamanya berasal dari kontribusi negara anggota, aliran kembali dari pinjaman (*loan re-flow*) dan pendapatan investasi (*investasi income*). Selama periode IFAD tahun 2001-2003, kontribusi donor mencakup sekitar 46% dari total sumber dana yang dubutuhkan, dan sisanya dipenuhi melalui aliran kembali dari pinjaman terdahulu (49%) dan penghasilan investasi (5%). (www.ifad.com)

3.1.5 Kontribusi *Replenishment* keanggotaan IFAD

Jumlah kontribusi yang diberikan kepada IFAD oleh masing-masing negara anggota berbeda jumlahnya. Hal ini ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional dan kemampuan negara anggota. Kewajiban Indonesia untuk memberikan kontribusi untuk dua tahunan kepada IFAD sejak tahun 1977 hingga 2006 sebesar US$ 41,959,000 secara rinci sebagai berikut:

a. *Initial Resources* (1977-1980) sebesar US$ 1,250,000
b. *First Replenishment* (1982-1983) sebesar US$ 1,909,000
c. *Second Replenishment* (1986-1987) sebesar US$ 6,900,000
d. *Third Replenishment* (1990-1992) sebesar US$ 6,900,000
e. *Fourth Replenishment* (1997-2000) sebesar US$ 10,000,000
f. *Fifth Replenishment* (2001-2003) sebesar US$ 10,000,000

g. *Sixth Replenishment* (2004-2006) sebesar US$ 5,000,000 (Profile keanggotaan Indonesia pada lembaga/organisasi internasional, Departement Pertanian, 2005: 67-73).

3.1.6 Kontribusi *Non- Replenishment* IFAD

Selain memberikan kontribusi untuk membiayai komitmen pinjaman dan hibah IFAD, negara-negara anggota menyatakan akan mendukung kegiatan IFAD melalui cara-cara lainnya yang disebut dengan IFAD *non-replenishment resources* sebagai "sumber dana tambahan", yang dibedakan dalam dua kategori yaitu: (i) Sumber dana tambahan untuk *co-financing* proyek dan program; dan (ii) Sumber dana tambahan seperti *trust funds* yang dikelola untuk studi-studi IFAD, *technical assistance* jangka pendek atau untuk program-prgram dengan satu atau multi donor dimana sejumlah proyek akan dibangun dibiayai atau *co-financed.*

3.1.7 Keanggotaan IFAD

Keanggotaan IFAD terbuka bagi semua negara yang merupakan anggota PBB atau badan-badan khusus lainnya. Keanggotaan IFAD terdiri atas; anggota asli *(original members*) dan anggota tidak asli (*non original members*). Anggota asli adalah negara-negara yang menjadi anggota sejak IFAD didirikan yang berjumlah 61 negara, terdiri atas 20 negara list A (negara-negara maju), 12 megara list B (negara-negara anggota OPEC), dan 29 negara list C (negara-negara lainnya Yang menjadi anggota IFAD setelah

IFAD didirikan. Sampai dengan saat ini anggota IFAD berjumlah 163 negara. (http://www.ifad.org/governance/ifad.htm, diakses [10 Februari 2009])

3.1.8 Struktur Organisasi IFAD

3.1.8.1 Dewan Gubernur IFAD

Kewenangan tertinggi IFAD adalah Dewan Gubernur, dimana 163 negara anggota masing-masing diwakili oleh seorang Gubernur dan Gubernur Pengganti. Sidang-sidang Dewan Gubernur diselenggarakan setiap tahun dan sidang khusus akan diselenggarakan jika dibutuhkan. Gubernur IFAD Indonesia saat ini masih berada pada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sedangkan Alternatenya adalah Watapri Indonesia untuk FAO/Duta besar LBPP untuk Italia.

3.1.8.2 Dewan Eksekutif IFAD

Dewan Eksekutif terdiri dari 16 anggota dan 18 anggota pengganti dengan masa kerja selama tiga tahun, bersidang tiga kali setahun serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan umum IFAD atas dasar mendat dari Dewan Gubernur. Anggota Dewan Eksekutif dipilih dari para anggota berdasarkan kategori list, yaitu 8 anggota dan 8 anggota pengganti untuk list A, 4 anggota dan 4 anggota pengganti untuk list B, serta 6 anggota dan 6 anggota pengganti untuk list C. Direktur Dewan Eksekutif untuk Indonesia saat ini berada pada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian sedangkan Alternatenya adalah Staf Ahli Mentan Bidang Kerjasama Pertanian Internasional Departement Pertanian.

3.1.8.3 Presiden IFAD

Presiden IFAD dipilih oleh Dewan Gubernur untuk jangka waktu empat tahun yang dapat dipilih kembali untuk satu tahun periode berikutnya. Presiden IFAD saat ini adalah Mr. Lennart Bage (Swedia), yang dipilih pada bulan Pebruari 2006 untuk periode 2006-2009. Sedangkan Wakilnya berasal dari Negara List C (Afika) yaitu Mr. Frank Enweze.

3.1.9 Kerangka Kerja IFAD

Sesuai dengan mandatnya, tujuan utama IFAD adalah untuk memberikan bantuan langsung dan memobilisasi dana tambahan untuk program yang sacara khusus dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan non-pertanian. Target grup dari IFAD adalah orang-orang yang paling miskin di dunia, petani, masyarakat yang tidak mempunyai lahan pengembala yang tidak mempunyai tempat tinggal, nelayan, masyarakat lokal dan wanita pedesaan yang miskin. Sejalan dengan bantuan IFAD yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan masyarakat pedesaan di negara-negara sedang berkembang, pinjaman dana disediakan untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah dengan jangka waktu pinjaman selama 40 tahun dengan bunga 0,75 persen per tahun. Pinjaman dana tersedia pula dalam bentuk setengah komersial dan komersil. Kerangka kerja strategi IFAD menggambarkan bagian dari komitmen global untuk mengembangkan *"The Millennium Development Goals"* (MDG).

IFAD akan melanjutkan bekerja dengan mengarahkan sasaran kepada masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui pengembangan pembangunan sosial, kesamaan gender, peningkatan pendapatan, peningkatn status gizi, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan *good governance.* Dikarenakan permasalahan masyarakat miskin sangat kompleks, usulan pemecahan yang dibutuhkan banyak hal yang harus diperhatikan disamping itu harus dapat diterima dan sesuai dengan permasalahn yang ada. Misalnya bicara masalah gender, sosial dan isu politik. Masyarakat miskin membutuhkan akses yang tidak sedikit diantaranya akses terhadap aset, kehidupan, sosial, alam, infrastruktur, teknologi dan keuangan yang terkendali dalam kehidupan sehari-harinya.

IFAD akan mengkonsentrasikan terhadap investasi, pengetahuan menejemen, dialog tetang kebijakan dan advokasi dari tiga tujuan strategi IFAD yaitu;

1. *Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Miskin Dalam Berorganisasi*, Salah satu kebutuhan masyarakat miskin adalah harapan terwujudnya perubahan kehidupan secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan akses ekonomi yang dibutuhkan dan pelayanan sosial yang mendasar serta infrastruktur. Kurang kuatnya organisasi sosial mengakibatkan sulitnya masyrakat miskin memperoleh potensi yang diperlukan dan mengembangkan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi, meningkatkan hubungan kekeluargaan dan sosial di tingkat masyarakat miskin

juga memungkinkan dilaksanakan untuk berinteraksi dengan penguasa yang memiliki kekuasaan secara informal dan pembicaraan akan lebih efektif dalam permasalahan yang sedang dihadapi. IFAD bekerja dengan berbagai tipe masyarakat miskin (desa tradisional, kelompok pengguna air dan petani koperasi).

2. *Meningkatkan Produktivitas Sumberdaya Alam Dan Teknologi Secara Adil,* Salah satu faktor yang paling penting untuk menghubungkan kepada kelompok masyarakat miskin adalah mengakses sumber daya alam seperti tanah, air dan hutan
3. *Meningkatkan Akses Terhadap Aset Keuangan dan Pemasaran,* Pelaksanaan Micro Finance dalam programnya merupakan salah satu moda terbaru sesuai dengan strategi IFAD masa mendatang. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat termiskin yang dipilih dengan target mereka dapat berusaha di sektor produk pertanian dengan pemanfaatan modal melalui kredit usaha kecil dari Bank Pedesaan. (Profile keanggotaan Indonesia pada lembaga/organisasi internasional, Departement Pertanian, 2005: 67-73)

3.2 Program *Rural Empowerment And Agricultural Development* (READ)

3.2.1 Latar Belakang Progran READ

Dukungan pada program pemberdayaan perdesaan dan pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah dianggap penting bagi IFAD. *Satu,* kawasan

perdesaan di Sulawesi Tengah meliputi sejumlah besar rumah tangga miskin dan propinsi ini merupakan salah satu propinsi miskin di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan keterisolasian sejumlah besar kawasan di dataran tinggi akibat kontur lahannya yang berbukit-bukit dan ketiadaan akses dan pelayanan. *Dua*, Lembaga ditingkat desa yang ada sedang dalam proses perubahan sebagai akibat terjadinya perubahan administratif karena desentralisasi, yang membuka peluang pengembangan proses perencanaan yang partisipatif dan menyeluruh di tingkat desa. Selain itu, sejumlah kelompok yang terbentuk oleh program lain, dapat menjadi tumpuan awal kegiatan Program. *Tiga*, Adanya peluang perbaikan mata pencaharian yang cukup signifikan, baik melalui pengembangan pertanian maupun usaha non pertanian. Saat ini tingkat produktivitas pertanian masih rendah, meski upaya peningkatan pertanian sederhana dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian secara substansial. Sulawesi Tengah memiliki keunggulan komparatif dalam berbagai produk pertanian, seperti: coklat, tembakau, kopi, vanila dan lada, namun rantai pemasarannya tidak efisien dan nilai tambah komoditi tersebut kecil, komoditi tersebut sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Ada peluang untuk mengatasi hal ini. *Empat*, Desentralisasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan dengan cara melaksanakan program mereka sendiri, seperti: melalui investasi prasarana perdesaan. Hal yang sama, terdapat peluang bagi Pemerintah Propinsi untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan di kawasan perdesaan atas nama Departemen Pertanian. Menurut hasil penilaian sosial-ekonomi yang

dilakukan tahun 2003, untuk memperbaiki mata pencaharian di perdesaan, diperlukan investasi sebagai berikut:

1) bantuan keuangan bagi para petani untuk memulai atau memperbaiki kegiatan pertanian;
2) perbaikan prasarana perdesaan;
3) pelatihan dan dukungan bagi petani miskin dalam produksi coklat dan kegiatan lainya.
4) pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang fokus pada kaum perempuan, termasuk dalam hortikultur dan peternakan skala kecil. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/read/READ%20Programme.pdf, diakses [6 Februari 2009])

Dari investigasi selanjutnya teridentifikasi kebutuhan:

1) investasi untuk meningkatkan kualitas bibit bagi para petani, khususnya bibit jagung dan padi;
2) perbaikan rantai pemasaran sehingga para petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi; (iii) pengelolaan sumber daya alam untuk mengatasi meningkatnya ancaman degradasi lingkungan di wilayah dataran tinggi.

Program READ akan mendukung Deparetemen Pertanian dalam mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk melaksanakan analisis kebijakan berdasarkan berbagai pengalaman keberhasilan yang ada serta berbagai inovasi yang diambil dari proyek-proyek IFAD dan program-program pengurangan kemiskinan lainnya dan untuk melakukan analisis

implikasi kebijakan untuk pengembangan kebijakan dimasa datang. Analisis yang dapat dikembangkan dari *Country Protfolio Evaluation* yang dirumuskan IFAD akan memberikan input bagi perumusan kebijakan pemerintah dan selanjutnya mendukung upaya perbaikan Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan yang fokus pada upaya mencapaian target *Millenium Development Goal* (MDG).

3.2.2 Tujuan Dan Sasaran Program READ

Program READ bermaksud untuk memperbaiki mata pencaharian kaum miskin perdesaan secara berkelanjutan di 150 desa sasaran di lima kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah (Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-toli). Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di desa-desa tersebut.

3.2.3 Output Yang Diharapkan Dari Program READ

1. Kelembagaan tingkat desa dan kegiatan kelompok yang berfungsi secara efektif.
2. Kelompok petani sasaran menerapkan sistem produksi dan pemasaran serta memahami sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan mampu membentuk usaha non pertanian baru dan/atau pengembangan usaha yang telah ada.

3. Perbaikan prasarana yang ada di desa-desa sasaran melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya.
4. Meningkatnya kapasitas Departemen Pertanian dalam melakukan analisis kebijakan dan merumuskan kebijakan bagi kaum miskin di perdesaan, disamping pula meningkatnya kapasitas mereka dalam menekankan permasalahan gender.

3.2.4 Pendekatan Program READ

Pendekatan program READ akan difokuskan pada elemen utama sebagai berikut:

1. Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola pembangunan sosial-ekonominya sehingga menjadi lembaga masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten.
2. Mendukung sistem desentralisasi pemerintahan untuk mendekatkan sumberdaya pemerintah pada masyarakat, meningkatkan kepekaan pada kebutuhan lokal dan akuntabilitas pemerintah pada masyarakat lokal.
3. Membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin agar mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan perbaikan ketahanan pangan dari Usaha Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya.

4. Memperbaiki kondisi prasarana perdesaan yang kurang memadai karena dapat menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani dan pengusaha lainnya, melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa.
5. Mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan dan Depertemen Pertanian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan program pengurangan kemiskinan

3.2.5 Kelompok Sasaran Dan Ruang Lingkup Program READ

Bedasarkan kriteria strategi mata pencaharian, di wilayah perdesaan propinsi Sulawesi Tengah, terdapat tujuh tipologi rumah tangga. Sasaran Program READ adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – Seleksi kelompok sasaran akan dilakukan bersama-sama oleh dinas/instansi pemerintah ditingkat propinsi, kabupaten dan masyarakat. Pemerintah propinsi dan kabupaten dengan bantuan dari penyedia jasa masyarakat yang direkrut akan membantu desa potensi READ untuk mengidentfikasi dan memilih anggota kelompok target. Program akan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu rumah tangga yang masuk kelompok 1 – 4 meningkat ke kelompok 5 dan 6. Program juga akan membantu rumah tangga kelompok 7 dan unit usaha yang lebih besar melalui penguatan keterkaitan

rantai pasokan untuk memberikan manfaat bagi kelompok sasaran utama. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/read/READ%20Programme.pdf, diakses [6 Februari 2009])

Dalam program READ terdapat tujuh tipe karakteristik mata pencaharian rumah tangga yang merupakan kelompok sasaran program tersebut yaitu *tipe satu*, masyarakat yang tidak memiliki lahan. *Tipe dua*, petani subsisten di sektor produksi pertanian tanaman pangan. *Tipe tiga*, petani yang mempunyai tambahan penghasilan dari anggota keluarga yang bekerja di luar desa. *Tipe empat*, petani yang mempunyai tambahan penghasilan di luar sektor pertanian. *Tipe lima*, masyarakat yang penghasilan utama keluarga yang lebih berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. *Tipe enam*, masyarakat yang penghasilan utamanya dari pertanian dan usaha-usaha skala kecil. *Tipe tujuh*, pengusaha pedesaan di sektor pertanian yang memperkerjakan masyarakat setempat dalam jumlah yang cukup signifikan. Program READ juga menyeleksi desa-desa berdasarkan empat indikator yaitu, index potensi lahan, index keterisolasian, index akses pada pelayanan umum, dan index organisasi. Dalam program ini juga terdapat empat komponen yang merupakan langkah-langkah dalam memperbaiki perekonomian masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah, keempat komponen itu terdiri dari Pemberdayaan Masyarakat, komponen ini meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan sesuai dengan sumber daya dan peluang yang dimilikinya.

Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya Dan Non-Budidaya, komponen ini dimaksudkan untuk menyediakan akses pada teknologi dan keterampilan manajemen yang bergerak sebagai pemasok barang dan jasa bagi petani miskin. Prasarana Pedesaan, komponen ini akan membiayai berbagai prasarana pedesaan yang di butuhkan para masyarakat pedesaan untuk akses pertanian mereka. Pengelolaan Proyek Dan Analisis Kebijakan, komponen ini mendukung pengelolaan dan koordinasi program READ melalui struktur pemerintahan yang ada. (http://www.deptan.go.id/bpsdm, [diakses 6 Februari 2009]).

Program READ direalisasikan pada tahun 2007-2011 dengan total dana sebesar US$ 28,33 juta. Dana tersebut terdiri dari US$ 21,08 juta dari *loan* IFAD, grant IFAD sebesar US$ 9,5 juta, pemerintah pusat sebesar US$ 1,3 juta. Pemerintah provinsi US$ 0,9 juta, pemerintah kabupaten/kota sebesar US$ 1,27 juta. (http://www.ifad.org/gbdocs/eb/88/e/EB-2006-88-R-18-Rev-1.pdf, [diakses 21 Maret 2009]).

Sumber lain yang menjelaskan mengenai kerjasama dalam READ dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (*Rural Empowerment and Agriculture Development Programme/*READ *Programme in Central Sulawesi*). (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.160/6/2007).

Program READ awalnya direncanakan akan berjalan pada tahun 2007-2011. Dalam proses implementasi program terdapat kendala finansial, sehingga

terjadi penundaan pelaksanaan program. Perencanaan pelaksanaan program ditunda menjadi tahun 2009-2014. (wawancara dengan Ir. Sri Damayanti, Med.,Mphil. READ *Programme Manager*).

Program ini merupakan sebuah kerjasama antara IFAD dan pemerintah Indonesia dalam bidang pertanian dan merupakan upaya dari pemerintah dalam penangulangan kemiskinaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dalam program ini IFAD berperan sebagai pemberi pinjaman, pembuat program, serta mengawasi program, sehingga dapat di realisasikan dengan baik, sedangkan badan pelaksana program dan lapangan di serahkan kepada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian di tingkat kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. Program READ yang di selenggarakan di Sulawesi tengah, selain fokus pada pembangunan pedesaan dan pertanian, program ini juga turut berperan dalam memperbaiki infrastruktur pedesaan di Sulawesi tengah seperti, penyedian lahan bagi para petani miskin, pembangunan saluran irigasi, fasilitas air bersih, dan jalan akses desa serta jalan usaha tani. Minimnya infrakstruktur di provinsi ini, merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan pedesaan dan pertanian di Sulawesi tengah, karena para petani tidak dapat menjual hasil taninya dan membuat terhanbatnya aktifitas-aktifitas pertanian lainnya, oleh karena itu IFAD melalui program READ ini berupaya menerapakan inovasi-inovasinya dalam perbaikan infrastruktur pedesaan di Sulawesi tengah, sehingga masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah, khusnya para petani dapat dengan mudah mengakses hasil taninya keluar desa dan mendapatkan hasil dari hasil

pertaniannya tersebut, sehinnga para petani dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/read/READ%20Program me.pdf, [diakses 6 Februari 2009])

3.2.6 Manfaat Program READ

1. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan produk kehutanan non kayu (NTFP) .Adanya perbaikan pasar serta tambahan pendapatan dari usaha non pertanian, diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat langsung Program.
2. Penyediaan prasarana, antara lain seperti: pembangunan saluran irigasi, fasilitas air bersih dan jalan akses desa serta jalan usaha tani.
3. Meningkatkan kapasitas kaum miskin baik laki-laki maupun perempuan, organisasi desa dan administrasi desa dalam mengelola pembangunan pertanian di perdesaan, termasuk perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan serta operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.
4. Membangun transparansi dan akuntabilitas administratif aparat di tingkat desa dan kabupaten
5. Memberikan dampak positif pada kaum perempuan serta perbaikan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, membuka peluang yang

lebih luas bagi perempuan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi.

6. Staff program dari dinas pertanian akan mampu mengelola proyek pembangunan pertanian dengan pendekatan partisipatif.
7. Otoritas ditingkat propinsi dan kabupaten akan memiliki pengalaman dan kecakapan dalam melaksanakan program pengurangan kemiskinan perdesaan dalam konteks desentralisasi tata pemerintahan.
8. BPSDMP (Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) akan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk melaksanakan peran fasilitasi dalam pembangunan pertanian yang terdesentralisasi.
9. Memberikan manfaat pada sekitar 220.000 penduduk di 48.500 rumah tangga dalam 150 desa. Disamping itu sejumlah penduduk di luar 150 desa tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari kegiatan program melalui penerapan teknologi yang diperkenalkan Program, pemanfaatan prasarana yang dibangun melalui Program. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/read/READ%20Programme.pdf, diakses [6 Februari 2009])

3.2.7 Organisasi Pengelolaan Program READ

READ akan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dengan lembaga pelaksana: (i) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

(BPSDMP)-NSU; (ii) Biro Kerjasama Luar Negeri; (iii) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah; dan (iv) Dinas Pertanian di lima kabupaten di Sulawesi Tengah.

3.2.7.1 Tingkat Pusat

The National Steering Committee atau NSC dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, yang terdiri dari wakil senior dari Depatemen Keuangan, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan unit terkait di Departemen Pertanian. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian – Departemen pertanian akan bertindak sebagai sekretariat NSC. NSC akan bertanggung jawab untuk menyediakan advis dan panduan bagi *National Support Unit* atau NSU mengenai: (i) kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin perdesaan; (ii) permasalahan koordinasi pelaksanaan program; (iii) umpan balik hasil analisis kebijakan yang dilakukan Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian; dan (iv) jika sesuai, menyiapkan rekomendasi bagi analisis kebijakan selanjutnya. NSC juga akan memfasilitasi upaya internalisasi hasil kajian kebijakan kedalam kerangka perumusan kebijakan di Indonesia. *The National Support Unit* atau NSU. Dibentuk oleh BPSDMP (Badan Pengembangan Sunber Daya Manusia Pertanian) sebagai *Lead Program Agency* Program ini. Tugas NSU ialah,

1. Melaksanakan supervisi dan implementasi program di tingkat nasional dan provinsi.
2. Menyiapkan *Draft Programme Implementation Manual* (PIM).

3. Bertindak sebagai penghubung IFAD.
4. Melakukan koordinasi dengan berbagai institusi ditingkat pusat seperti dengan Departemen keuangan dan Bappenas.
5. Memfasilitasi pencairan dana bagi pemerintah provinsi dan kabupaten.

3.2.7.2 Tingkat Provinsi

Provincial Management Unit atau PMU akan berada di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi akan menyediakan ruang kantor bagi PMU dan membiayai biaya operasi rutinnya termasuk biaya gaji staf, rutin kantor dan operasional kendaraan. Tugas PMU ialah.

1. Melakukan supervisi dan menyediakan dukungan pada pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten.
2. Melakukan seleksi akhir desa calon peserta program berdasarkan usulan kabupaten.
3. Melakukan pengembangan kapasitas bagi staf yang bertugas di tingkat kabupaten.
4. Melakukan pengelolaan keuangan program, termasuk penyampaian aplikasi pembiayaan kegiatan dan pengelolaan program.
5. Berpatisipasi dalam berbagai resolusi konflik dan strategi menghindari konflik.

3.2.7.3 Tingkat Kabupaten

District Management Unit atau DMU berada di Dinas Pertanian masing-masing kabupaten peserta Program yang terdiri dari staf yang berkualitas dan bekerja secara penuh. DMU dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Tugas DMU ialah,

1. Menyeleksi desa sasaran sesuai dengan kriteria program READ.
2. Menjamin bahwa seluruh investasi prasarana layak, serta operasi dan pemeliharaanya berkelanjutan bekerjasama dengan dinas teknis terkait.
3. Melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan termasuk catatan keuangan dan akuntansi belanja di tingkat kabupaten
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan program di tingkat provinsi
5. Menyediakan informasi analisis lanjutan bagi biro kerjasama luar negeri – Departemen Pertanian mengenai permasalahan kebijakan yang teridentifikasi di tingkat masyarakat dan kabupaten. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/read/READ%20Programme.pdf, diakses[6 Februari 2009])

3.3 Sulawesi Tengah

3.3.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan Provinsi terbesar di pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 68.033 km yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta kepulauan Togian di Teluk Tomini dan

Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah laut adalah 189.480 km. Sulawesi Tengah memiliki sebelas kabupaten/kota yang terdiri dari, kabupaten Banggai Beribukota Luwuk, kabupaten Banggai Kepulauan Beribukota Banggai, kabupaten Buol Beribukota Buol, kabupaten Donggala Beribukota Donggala, kabupaten Morowali Beribukota Bungku, kabupaten Parigi Moutong Beribukota Parigi, kabupaten Poso beribukota Poso, kabupaten Tojo Una-Una Beribukota Ampana, kabupaten Toli-Toli Beribukota Toli-Toli, kabupaten Sigi Beribukota Sigibiromaru, dan kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah. (Sejarah Singkat provinsi Sulawesi Tengah, 2006).

Penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2005 sebanyak 2.294.841 jiwa dan meningkat sebanyak 2.396.223 jiwa pada tahun 2007 dengan perincian menurut kabupaten sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2007 (Jiwa)

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2005	2006	2007 *)
1	Banggai Kepulauan	150,576	152,807	154,455
2	Banggai	288,399	291,782	294,033
3	Morowali	170,187	173,266	175,700
4	Poso	134,665	143,376	152,044
5	Donggala	450,800	459,195	465,890
6	Tolitoli	190,178	193,568	196,237
7	Buol	110,399	112,960	115,121
8	Parigi Moutong	353,465	360,888	367,004
9	Tojo Una-Una	152,478	161,791	170,992
10	Kota Palu	293,694	299,765	304,747
SULAWESI TENGAH		**2,294,841**	**2,349,398**	**2,396,223**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Nilai PDRB Sulawesi Tengah tahun 2007 (harga konstan 2000) sebesar Rp. 13.683 Miliar dengan jumlah tenaga kerja dari semua lapangan usaha adalah 1.083.944 orang. Produktivitas tenaga kerja tersebut Rp. 339.942.809 dengan persentase daya serap tenaga kerja sebesar 100%. (http://www.sulteng.go.id/pub2/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=114, [diakses 9 Agustus 2009]).

Berdasarkan badan pusat statistik Republik Indonesia tahun 2007, tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di provinsi Sulawesi tenggah berjumlah 490,3 ribu jiwa (24,97%). Jumlah tersebut merupakan hasil keseluruhan dari lima kabupaten Sulawesi tengah yaitu, Bangai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-toli. (http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-01jul08.pdf, diakses [21 Maret 2009]) Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk1miskin (http://www.bapenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/cgi_ed.pdf, diakses [21 Maret 2009])

3.3.2 Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah

Visi yang ingin dicapai adalah “ Terwujudnya Sulawesi Tengah Yang Aman, Damai, Adil, dan Sejahtera yang di Landasi Iman dan Taqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa”.

Misi yang ingin di capai oleh Provinsi Sulawesi Tengah adalah mewujudkan kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, mewujudkan suasana damai dan ketentraman masyarakat, mewujudakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam proses pencapaian visi dan misi tersebut maka dibutuhkan suatu strategi untuk proses pelaksanaan di wilayah Sulawesi Tengah. Strategi tersebut adalah optimalisasi fungsi – fungsi perangakat dan aparatur penegak hukum dan keamanan, membangun komunikasi politik dan sosialdengan berbagai elemen masyarakat, penerapan peraturan dan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran, dan pengolahan sumber daya yang berbasis partisipasi, kemajemukan dan potensi lokal.

Dalam program pembangunan provinsi Sulawesi Tengah dilihat dari beberapa bidang yaitu ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, pemerintahan dan aparatur, pemberdayaan perempuan, Politik, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Bidang ekonomi yang difokuskan pada pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, pemanfataan sumber daya mineral, sumber daya hutan serta sumber daya lainnya, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, transportasi. komunikasi dan informasi.

Bidang hukum yang difokuskan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah serta sosialisasi kepada masyarakat baik produk hukum maupun hukum nasional, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan legal culture (budaya taat hukum), dan peningkatan penegakan supremasi hukum di semua lintas sektor pembangunan tanpa pandang bulu.

Bidang pendidikan yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang dapat menampung anak usia sekolah, perluasan kesempatan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah mengikuti pendidikan secara luas dan merata, peningkatan jumlah, mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik, perluasan peluang dan bantuan secara selektif terhadap sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3, dan peningkatan pendidikan pembinaan mental spiritual (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara mandiri dan melembaga.

Bidang kesehatan yang difokuskan pada penyusunan standar pelayanan minimum kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat serta pemerataan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan cara menekan angka kematian bayi dan anak balita serta kematian ibu melahirkan, meningkatkan angka usia harapan hidup, menakan angka sakit berdasarkan jenis penyakit serta melaksanakan perbaikan gizi melalui pemantapan sistem kewaspadaan gizi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui peningkatan status Rumah Sakit Umum, mengoptimalkan

peran Puskesmas, Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Posyandu, sebagai lembaga pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat.

Bidang pembinaan generasi muda yang difokuskan pada mewujudkan kemandirian masyarakat/generasi muda melaui pendekatan Tribina yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan yang difokuskan pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam program pembangunan dan kebijakan politik.

Bidang politik, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang difokuskan pada stabilitas politik, penegakan HAM, pemberantasan KKN, pemberdayaan Tri Kerukunan Umat Beragama.

Bidang pemerintahan dan aparatur yang difokuskan pada pelaksanaan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), pemerintahan yang baik (*good govermance*) dan pemerintahan yang kuat (*strong goverment*) pada semua tingkatan pemerintahan, pengembangan *Reinventing Goverment* dimana aparat berfungsi sebagai pelayan masyarakat, peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai pada setiap badan, Dinas dan Instansi untuk menangani permasalahan di daerah secara terpadu dalam bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang berorientasi pad kepuasan masyarakat, pendayagunaan aparatur pemerintah berdasarkan kompentensi dalam rangka pembinaan profesionalisme pegawai, pembinaan karir pegawai negeri sipil yang mencakup eselonisasi, golongan,

kepangkatan, dan promosi jabatan, dan peningkatan kesejahteraan PNS dan fasilitas pendukung tugas – tugas pemerintahan. (http://www.sulteng.go.id/affan /Visi%20Misi.doc, [diakses 12 Agustus 2009])

3.3.3 Sektor Pertanian di Sulawesi Tengah

Perkembangan sektor pertanian sangat dominan dalam perekonomian dan tingkat pendapatan khususnya masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah, dikarenakan sebagian besar masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah bermata pencaharian pada sektor pertanian. Pada Tahun 2001 konstribusi pertanian dalam *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) sebesar 48,15 % mengalami peningkatan Tahun 2002, selanjutnya 49,13 % tahun 2003 serta 49,20 % tahun 2004. (http://www.infokomsulteng.go.id/infokom.php?id=167&1582875&ss= 665dc5fb7a0b84068929de8e20838655&uid=, [diakses 9 Mei 2009])

Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilakukan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan telah dapat meningkatkan produksi dan eksport beberapa komoditas unggulan walau secara keseluruan belum memberikan nilai tambah dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Produksi pertanian telah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam tahun-tahun terakhir, walau masih terganggu dan dihambat oleh berbagai hal yang terkait dengan pengembangan usaha tani masyarakat, terutama rendahnya kualitas berbagai produk yang dihasilkan sehingga menyulitkan pemasaran, pemanfaatan faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja dan agro input yang belum efisien serta kerja sama diantara petani yang

masih lemah yang langsung mempengaruhi produktifitas yang dicapai. (http://www.infokomsulteng.go.id/infokom.php?id=167&1582875&ss=665dc5fb7a0b84068929de8e20838655&uid=, [diakses 9 Mei 2009])

Pembangunan pertanian dinilai sangat strategis, mengingat jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian sangat besar, pembangunan pertanian tidak hanya sekedar meningkatkan produksi untuk kebutuhan penyediaan pangan dan gizi akan tetapi diarahkan pada usaha tani yang berwawasan agribisnis dan agroindustri untuk dapat menunjang peningkatan pendapatan kesejahteraan petani. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Sulawesi Tengah cenderung terus menguat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Bidang sektor pertanian tetap menjadi motor pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja, serta memberikan sumbangan besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Jika dilihat di lima kabupaten, jumlah rumah tangga pertanian masing-masing daerah meningkat, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 65,885 (17,68 %), Kabupaten Poso sebanyak 54,046 (14,50 %), Kabupaten Toli-Toli sebanyak 32,984 (8,85 %), Kabupaten Banggai sebanyak 31,517 (8,46 %), Kabupaten Buol sebanyak 31,517 (8,88%). (http://www.infokomsulteng.go.id/infokom., [diakses 9 Mei 2009])

3.3.4 Pertanian Tanaman Pangan di Sulawesi Tengah

Pada sektor pertanian tanaman pangan di Sulawesi Tengah difokuskan pada tanaman pangan yaitu padi, palawija, tanaman sayur-yayuran, dan buah-buahan. Pada sektor pertanian tanaman pangan yaitu angka produksi padi Sulawesi Tengah tahun 2005 sebanyak 716.905 ton. Bila dibandingkan terhadap tahun 2004 dengan produksi padi 694.921 ton berarti mengalami peningkatan sekitar 3,16 persen. Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari 39,48 kw/ha tahun 2004 menjadi 40,85 kw/ha tahun 2005, meskipun terjadi penurunan pada luas panen dari 179.029 ha tahun 2004 menjadi 175.489 ha di tahun 2005.

Pada sektor pertanian tanaman palawija yaitu tanaman palawija terdiri atas tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Produksi palawija pada tahun 2005 mengalami peningkatan, kecuali komoditi ubi jalar, bila dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi jagung tahun 2005 sebanyak 57.617 ton, dibandingkan dengan tahun 2004 yang produksinya hanya mencapai 53.452 ton, maka ini berarti terjadi peningkatan sebesar 26,45 persen. Untuk Ubi Kayu produksi tahun 2005 tarcatat sebesar 48.255 ton, angka ini naik sebesar 6,98 persen dari angka 2004 yang hasilnya hanya mencapai 45.106 ton. Lain halnya dengan produksi ubi jalar yang tahun 2004 produksinya sebesar 27.903 ton turun menjadi 23.768 ton pada tahun 2005 (turun 14,81 persen). Produksi kacang tanah pada tahun 2004 yang produksinya sebanyak 7.308 ton, meningkat menjadi 9.201 tahun 2005 atau terjadi peningkatan sebesar 25,90 persen. Kemudian kacang kedele

pada tahun 2005 mengalami peningkatan produksi, di mana pada tahun 2004 produksinya sebanyak 2.085 ton naik menjadi 2.240 ton tahun 2005 atau naik sebesar 7,43 persen. Sementara untuk produksi kacang hijau pada tahun 2005 juga mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.310 ton tahun 2004 menjadi 1.380 ton tahun 2005 atau terjadi peningkatan sebesar 5,34 persen. Peningkatan produksi komoditi palawija tahun 2005 tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan luas panen setiap komoditi.

Pada sektor pertanian tanaman sayur-sayuran yaitu tanaman sayur-sayuran di Sulawesi Tengah yang tercatat perkembangannya meliputi tujuh belas jenis tanaman sayur-sayuran mulai dari Bawang daun, Kentang, Kubis, sampai dengan Kangkung. Di Tahun 2005 dari 17 jenis tanaman sayur sayuran yang mempunyai produksi terbesar adalah sayuran jenis tomat yang mencapai 58.260 ton. Sementara yang memiliki luas areal panen terluas adalah kacang-kacangan yang tercatat sebesar 1.392 ha. Sedangkan ditinjau dari produktivitasnya dari 17 jenis tanaman tersebut yang tertinggi adalah tanaman bawang merah dengan 7,16 kw/ha.

Pada sektor pertanian tanaman buah-buahan yaitu luas panen dan produksi tanaman buah-buahan masih menggambarkan keadaan data pada tahun 2005, yang mencakup 21 jenis tanaman buah-buahan diantaranya jeruk, pisang, nenas, durian dan lain sebagainya.(http://www.indonesia.go.id//index2.phpoption [diakses 3 Agustus 2009])

Tabel 3.2
Luas panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi Sawah menurut Kabupaten/ Kota 2001-2005

No	Kabupaten / Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Hasil per Hektar (Kw/Ha)
1	Banggai Kepulauan	454	1.321	29,10
2	Banggai	30.793	120.201	39,04
3	Morowali	8.529	30 449	35,70
4	Poso	17.859	64.471	36,10
5	Donggala	43.382	194.958	44,94
6	Tolitoli	17.030	65.757	38,61
7	Buol	4.448	17.493	39,33
8	Parigi Moutong	44.798	201.496	44,98
9	Tojo Una-Una	1.227	3.730	30,40
10	Palu	349	1.363	39,05

(Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah)

Dari tabel 3.2 dapat di lihat bahwa luas panen, produksi padi, dan hasil per hektar tertingi Terdapat di kabupaten Parigi Moutong yaitu 44,98 (KW/Ha) sedangkan hasil terendah terdapat di kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 29,10 (Kw/Ha).

Tabel 3.3
Luas panen, Hasil per Hektar dan Produksi Padi Ladang menurut Kabupaten / Kota 2001-2005

No	Kabupaten / Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Hasil per Hektar (Kw/Ha)
1	Banggai Kepulauan	0	0	0
2	Banggai	2.136	5.066	23,72
3	Morowali	1.136	2.583	22,74
4	Poso	511	1.131	22,13
5	Donggala	1.479	3.757	25,40
6	Tolitoli	60	132	22,00
7	Buol	699	1.640	23,46
8	Parigi Moutong	0	0	0
9	Tojo Una-Una	599	1.357	22,65
10	Palu	0	0	0

(Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah)

Dari tabel 3.3 dapat di lihat bahwa luas panen, produksi padi ladang, dan hasil per hektar tertingi Terdapat di kabupaten Donggala yaitu 25,40 (Kw/Ha) sedangkan hasil terendah terdapat di kabupaten Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, dan Palu yaitu 0 (Kw/Ha).

Tabel 3.4
Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Padi (Sawah Ladang) menurut KabupatenKota 2001-2005

No	Kabupaten / Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Hasil per Hektar (Kw/Ha)
1	Banggai Kepulauan	454	1.321	29,10
2	Banggai	32.929	125.267	38,04
3	Morowali	9.665	33.032	34,18
4	Poso	18.370	65.602	35,71
5	Donggala	44.861	198.715	44,30
6	Tolitoli	17.090	65.889	38,55
7	Buol	5.147	19.133	37,17
8	Parigi Moutong	44.798	201.496	44,98
9	Tojo Una-Una	1.826	5.087	27,86
10	Palu	349	1.363	39,05

(Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah)

Dari tabel 3.4 dapat di lihat bahwa luas panen, hasil per hekta, dan produksi padi (sawah Ladang)r tertingi Terdapat di kabupaten Parigi Moutong yaitu 44,98 (Kw/Ha) sedangkan hasil terendah terdapat di kabupaten Tojo Una-Una yaitu 27,86 (Kw/Ha).

3.3.5 Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah

Dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 kontribusi sektor pertanian mencapai angka 49,13 persen. Angka tersebut lebih besar daripada tahun 1999, dimana peranan sektor

pertanian mencapai 45,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus guna peningkatan perekonomian dan pendapatan di Sulawesi Tengah. Sub sektor tanaman pangan sebagai salah satu sub sektor pertanian yang turut mendukung terbentuknya PDRB Sulawesi Tengah, dengan kontribusi sebesar 14,74 persen, menempati urutan kedua setelah sub sektor perkebunan yaitu sebesar 24,09 persen.

Tiga komoditas pertanian yakni padi, kakao dan bawang merah lokal merupakan komoditas yang mempunyai arti penting dalam perekonomian propinsi Sulawesi Tengah. Usahatani padi mempunyai arti penting disebabkan karena masih merupakan sumber penghasilan utama rumah tangga pertanian. Bahkan hasil survai pendapatan petani di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa 69,4% petani tanaman pangan, pendapatan utamanya bersumber dari usaha tanaman padi. Tanaman kakao merupakan komoditas unggulan Nasional yang dicerminkan dari Analisis *Land Quetion* (LQ) terbesar dari komoditas pertanian lainnya yakni 3,80. Tanaman bawang merah lokal yang dikenal dengan nama bawang Palu merupakan komoditas spesifik Sulawesi Tengah dan merupakan bahan baku untuk industri bawang goreng. Salah satu keunikan dari bawang merah lokal Palu adalah mempunyai tekstur umbi yang padat sehingga menghasilkan bawang goreng yang renyah dan gurih. Hal ini menyebabkan bawang goreng yang dihasilkan dari bawang lokal palu menjadi komoditas spesifik yang banyak diminati oleh turis lokal yang datang ke Sulawesi Tengah.

Komponen teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman mempunyai peran yang tidak kecil dalam peningkatan produktivitas dan kualitas

hasil tanaman padi, Kakao dan Bawang merah lokal. Adanya serangan hama dan penyakit secara langsung dapat menurunkan hasil baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pada tahun 2005 dilaporkan luas serangan hama dan penyakit pada tanaman padi mencapai 12.152,3 ha dengan total kehilangan hasil mencapai 14.061,842 ton GKP atau setara dengan Rp.24.249.136.660, sedangkan luas serangan PBK pada tanaman kakao adalah 37.485 ha dengan taksasi kerugian Rp.59.967.600.000 dan bawang merah seluas 75 ha .

Sistim pengendalian hama/penyakit tanaman yang diterapkan saat ini mengacu kepada konsep pengendalian hama/penyakit tanaman terpadu (PHT). Konsep ini telah lama diperkenalkan dan menjadi kebijakan dasar program perlindungan tanaman sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Konsep ini menganut 5 (lima) yaitu: (1) Membudidayakan tanaman sehat, (2) memanfaatkan sebesar-besarnya musuh alami, (3) menggunakan varietas tahan, (4) menggunakan pengendalian fisik/mekanik dan (5) dan penggunaan pestisida bilamana perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus mendukung peningkatan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah maka perlu adanya rumusan kebijakan untuk menekan terjadinya kehilangan hasil yang disebabkan oleh adanya serangan hama/penyakit tanaman. Sampai sejauhmana kebijakan penerapan pengendalian hama/penyakit tanaman terpadu (PHT) di Sulawesi Tengah, kendala penerapan serta kebijakan yang diperlukan untuk mensukseskan penerapannya ditingkat petani dianalisis dalam kajian ini.

Komponen teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman mempunyai peran yang tidak kecil dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman padi, Kakao dan Bawang merah lokal. Adanya serangan hama dan penyakit secara langsung dapat menurunkan hasil baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pada tahun 2005 dilaporkan luas serangan hama dan penyakit pada tanaman padi mencapai 12.152,3 ha dengan total kehilangan hasil mencapai 14.061,842 ton GKP atau setara dengan Rp.24.249.136.660, sedangkan luas serangan PBK pada tanaman kakao adalah 37.485 ha dengan taksasi kerugian Rp.59.967.600.000 dan bawang merah seluas 75 ha. Sistim pengendalian hama/penyakit tanaman yang diterapkan saat ini mengacu kepada konsep pengendalian hama/penyakit tanaman terpadu (PHT). Konsep ini telah lama diperkenalkan dan menjadi kebijakan dasar program perlindungan tanaman sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Konsep ini menganut 5 (lima) prinsip yaitu: (1) Membudidayakan tanaman sehat, (2) memanfaatkan sebesar-besarnya musuh alami, (3) menggunakan varietas tahan, (4) menggunakan pengendalian fisik/mekanik dan (5) dan penggunaan pestisida bilamana perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus mendukung peningkatan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah maka perlu adanya rumusan kebijakan untuk menekan terjadinya kehilangan hasil yang disebabkan oleh adanya serangan hama/penyakit tanaman. Sampai sejauhmana kebijakan penerapan pengendalian hama/penyakit tanaman terpadu (PHT) di Sulawesi

Tengah, kendala penerapan serta kebijakan yang diperlukan untuk mensukseskan penerapannya ditingkat petani akan diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Kajian menunjukkan bahwa pengendalian OPT pada tanaman padi yang dilakukan oleh petani masih didominan penggunaan racun (97,5 %). Penggunaan racun dilakukan karena tingkat efektivitasnya masih dirasakan tinggi. Namun demikian terlihat bahwa petani yang pernah mengikuti SLPHT tanaman padi umumnya telah menerapkan komponen PHT walaupun belum secara tidak lengkap, dan hanya 25 % yang tidak menerapkannya. Adanya kesadaran petani untuk menerapkan komponen PHT disebabkan karena adanya manfaat yang dirasakan diantaranya bahwa dengan melakukan pemantauan lapangan maka serangan hama dapat dilakukan secara awal dan berpengaruh terhadap penurunan jumlah racun yang digunakan. (http://sulteng.litbang.deptan.go.id/index, [diakses 9 Agustus 2009])

3.3.6 Tingkat Pendapatan Masyarakat Petani Di Sulawesi Tengah

Target Pertumbuhan PDRB Per-kapita Sulawesi Tengah adalah sekitar 1,700 US$ (2.5 kali) pada tahun 2024, meningkat dari 600 US$ pada tahun 2005**.** PDRB Sulawesi pada tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp. 265 triliun menurut angka peningkatan tahunan 7 %. (4.5 % pada sektor pertanian dan 8 % pada sektor non-pertanian). PDRB untuk propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2005 sebesar 15 % dari Rp. 73,1 miliyar dan akan meningkat sebesar 17 % dari Rp. 265,000 miliyar pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah)

Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di pedesaan Sulawesi Tengah berjumlah 490.3000 orang (24,97%) dan mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 463.8000 (23,22%). Rata-rata upah nominal harian buruh tani selama periode bulan Maret 2007-Maret 2008 meningkat 9,88 persen, naik dari Rp.14.932,- pada Maret 2007 menjadi Rp.16.407,- pada Maret 2008. Pada periode yang sama, rata-rata upah riil harian buruh tani juga mengalami kenaikan 0,90 persen, yaitu dari Rp.2.553,- pada Maret 2007 menjadi Rp.2.576,- pada Maret 2008. Artinya, daya beli buruh tani relatif sedikit membaik. (http://www.bps. go.id /releases/files/kemiskinan-01jul08.pdf, [diakses 21 Maret 2009]).

Faktor-faktor yang menghambat tingkat pendapatan masyarakat pedesaan di sulawesi tengah ialah kurangnya akses jalan masuk untuk mendistribusikan hasil pertanian mereka ke pasar, selain itu masalah masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi dan terpencil, sehingga masyarakat pedesaan di sulawesi tengah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik satu hubungan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah beralasan menjadi Provinsi berbasis Industri Pertanian dan bukan hanya sekedar menjadi Provinsi penyedia bahan baku, raw material. Kenapa harus Industri Pertanian, karena dengan Industri Pertanian akan menyerap tenaga kerja berlipat ganda dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar serta mempunyai efek domino yang besar kemudian pada akhirnya akan mendorong PDRB Sulteng menjadi lebih besar. (http://74.125.153.132/search?q=cache:2x8 Ew0bOzgJ:www.radarsulteng.com/sektor+pertanian+sulawesi+tengah, [diakses 9 Agustus 2009]).